

## Yusuf Serahkan Bukti Ancaman ke Polisi

**JAKARTA** — Politikus senior sekaligus pendiri Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera), Yusuf Supendi, kembali mendatangi Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI kemarin. Kedatangannya kali ini untuk melengkapi laporan sehari sebelumnya ihwal dugaan fitnah yang dilakukan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq terhadap Yusuf.

"Kami bawa beberapa bukti, seperti telepon genggam dan sebagainya," kata pengacara Yusuf, Ahmad Rivai, di Mabes Polri kemarin. Menurut dia, pesan singkat yang dikirim Luthfi berupa tuduhan bahwa Yusuf bersama Badan Intelijen Negara berusaha menjatuhkan partai. Pesan singkat itu dikirim Luthfi pada 5 Juli 2010 pukul 22.11 WIB. "Kami melengkapi laporan bila LHI melakukan fitnah, intimidasi, dan pencemaran nama baik," ujarnya.

Selain itu, menurut Rivai, kliennya mendapat sejumlah pesan ancaman. Misalnya, ancaman mengosongkan rumah dan penorehan tanda silang berwarna merah di bagian depan rumah Yusuf. Laporan Yusuf resmi diterima Direktorat I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri dengan nomor 195/III/2011.

Yusuf yakin, pesan-pesan singkat itu berasal dari nomor Luthfi. Sebab, nomor itulah yang biasa dipakai yang bersangkutan. Pesan singkat yang meminta Yusuf keluar dari rumahnya dikirim pada 15 Juni 2010 dari nomor 0816940XXX. "Ada juga pesan singkat seluruh kader PKS dilarang menghubungi saya," kata Yusuf.

Ihwal jumlah pesan singkat yang diterima, Yusuf mengaku tak dapat memastikan. Namun, berdasarkan hasil cetakan yang diserahkan ke penyidik, pesan itu termuat dalam 143 lembar kertas.

Saat dimintai konfirmasi, Presiden PKS Luthfi Hasan enggan berkomentar soal laporan Yusuf ini. "Saya tidak akan berkomentar soal itu," kata dia saat dihubungi kemarin.

● CORNILA DESYANA | AMIRULLAH

# KPK: RUU Tipikor Lemahkan Pemberantasan Korupsi

"Setiap masukan dan usulan untuk perbaikan, kita terima," kata staf presiden.

**JAKARTA** — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melemahkan agenda nasional pemberantasan korupsi. Sebab, di dalamnya terkandung sejumlah pasal yang muatannya tak lebih bagus dibanding undang-undang antikorupsi yang sekarang berlaku dan akan direvisi.

"RUU Tipikor harus lebih sempurna dari yang sudah ada. Bila pasal-pasal itu tidak berubah, buramlah potret pemberantasan korupsi Indonesia ke depan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin saat dihubungi kemarin. Sekadar contoh, ia menyebutkan

keberadaan pasal 52, yang mengatur bahwa korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari tuntutan hukum. "Itu akan menyuburkan korupsi kecil di layanan publik," kata Jasin.

Adapun pasal 32 dinilai melemahkan KPK karena tidak menyebutkan adanya kewenangan penuntutan bagi lembaga ini. Menurut Jasin, ketentuan itu jelas memangkas kewenangan komisi antikorupsi. Ia khawatir pasal itu membuat proses penuntutan akan sekadar bolak-balik antara KPK dan kejaksaan. "Pemberantasan korupsi akan lambat dan sulit seperti yang dulu lagi," ujar Jasin.

Dalam urusan ini, Ahad lalu, Indonesia Corruption Watch mencatat ada sembilan norma yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi dalam RUU Tipikor. Selain yang su-

dah disebutkan Jasin, ada kelemahan lain, seperti hilangnya ancaman hukuman mati, hilangnya pasal tentang kerugian negara, dan hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal. ICW juga menemukan pasal yang potensial mengkriminalkan pelapor kasus korupsi.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana, menyatakan pemerintah siap menerima masukan untuk memperbaiki draf RUU Tipikor. Perubahan masih mungkin dilakukan karena belum menjadi draf final dari pemerintah. "Setiap masukan dan usulan untuk perbaikan kita terima, termasuk pandangan dari ICW," kata Denny.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berjanji

akan melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU Tipikor jika sudah sampai ke Dewan. "Kalau masalah korupsi, tentu ICW jadi sarana representasi dari suara publik," kata Pramono di Semarang kemarin. Selain itu, Forum Rektor layak dilibatkan karena mereka juga kritis terhadap masalah korupsi di Tanah Air.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, draf RUU Tipikor tersebut saat ini masih tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Rencananya, paling lambat dua bulan mendatang draf tersebut akan rampung. "Satu-dua bulan lagi. Itu harus dipersiapkan betul. Belum ke presiden, masih di Kemerkumham," kata dia di gedung DPR, Senin lalu.

● RIRIN AGUSTIA | EKO ARI | MUNAWWAROH | ROFIUDDIN | DWI WIYANA



## PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

### NERACA KONSOLIDASI 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

| AKTIVA  |                  |                | KEWAJIBAN DAN EKUITAS                          |                  |                |
|---|------------------|----------------|--|------------------|----------------|
|   | 2010             | 2009           |  | 2010             | 2009           |
| <b>AKTIVA LANCAR</b>                                |                  |                | <b>KEWAJIBAN LANCAR</b>                        |                  |                |
| KAS DAN SETARA KAS                                  | 206.585          | 337.162        | HUTANG USAHA                                   | 45.954           | 49.884         |
| PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA                     | 216.394          | 91.685         | HUTANG PAJAK                                   | 56.082           | 191.544        |
| PIUTANG LAIN-LAIN:                                  | 4.842            | 2.663          | HUTANG LAIN-LAIN:                              |                  |                |
| PERSEDIAAN  |                  |                | Pihak ketiga                                   | 202.736          | 90.310         |
| Setelah dikurangi penyisihan persediaan             |                  |                | Pihak yang mempunyai hubungan istimewa         | 14.136           | 15.814         |
| <i>slow-moving</i> sebesar Rp 5.115 juta pada tahun |                  |                | HUTANG DIVIDEN:                                |                  |                |
| 2010 dan Rp 5.218 juta pada tahun 2009              | 101.153          | 110.497        | Pihak ketiga                                   | 4.195            | 45.146         |
| BIAYA DIBAYAR DI MUKA                               | 47.110           | 14.200         | Pihak yang mempunyai hubungan istimewa         | -                | 193.574        |
| AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN                             | 21.157           | 5.275          | BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR                 | 141.201          | 94.386         |
| <b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>                         | <b>597.241</b>   | <b>561.482</b> | JAMINAN EMBALASI                               | 162.374          | 146.593        |
|   |                  |                | INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF                   | 5.348            | 24.943         |
| <b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>                          |                  |                | <b>JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR</b>                 | <b>632.026</b>   | <b>852.194</b> |
| AKTIVA PAJAK TANGGUHAN, bersih                      | 6.069            | 5.661          | <b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>                  |                  |                |
| AKTIVA TETAP  |                  |                | KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN, bersih              | 26.679           | 29.533         |
| Setelah dikurangi akumulasi penyusutan              |                  |                | PENYISIHAN UNTUK IMBALAN KERJA                 | 7.009            | 6.395          |
| sebesar Rp 500.872 juta dan penyisihan              |                  |                | <b>JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>           | <b>33.688</b>    | <b>35.928</b>  |
| penurunan nilai aktiva sebesar Rp 14.311 juta       |                  |                | <b>HAK MINORITAS</b>                           | <b>147</b>       | <b>132</b>     |
| pada tahun 2010 (2009: Rp 421.963 juta dan          |                  |                | <b>EKUITAS</b>                                 |                  |                |
| Rp 2.495 juta)                                      | 528.879          | 420.864        | MODAL SAHAM, nilai nominal Rp 1.000 per saham: |                  |                |
| AKTIVA TAK BERWUJUD                                 |                  |                | Modal dasar, telah ditempatkan dan             |                  |                |
| Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp 13.602      |                  |                | disetor penuh 21.070.000 saham                 | 21.070           | 21.070         |
| juta pada tahun 2010 dan Rp 12.788 pada tahun 2009  | 30               | 843            | TAMBAHAN MODAL DISETOR                         | 1.802            | 1.802          |
| AKTIVA LAIN-LAIN                                    | 4.863            | 4.615          | SALDO LABA                                     |                  |                |
| <b>JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR</b>                   | <b>539.841</b>   | <b>431.983</b> | Sudah ditentukan penggunaannya                 | 7                | 6              |
|   |                  |                | Belum ditentukan penggunaannya                 | 448.342          | 82.333         |
| <b>JUMLAH AKTIVA</b>                                | <b>1.137.082</b> | <b>993.465</b> | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                          | <b>471.221</b>   | <b>105.211</b> |
|   |                  |                | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>            | <b>1.137.082</b> | <b>993.465</b> |

### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Periode berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

|   | 2010              | 2009              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>   | 1.790.164         | 1.616.264         |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>  | (761.988)         | (766.918)         |
| <b>LABA KOTOR</b>   | <b>1.028.176</b>  | <b>849.346</b>    |
| <b>BEBAN USAHA:</b>   |                   |                   |
| Beban pemasaran dan penjualan   | (321.838)         | (276.801)         |
| Beban umum dan administrasi   | (90.050)          | (59.161)          |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>   | <b>(411.888)</b>  | <b>(335.962)</b>  |
| <b>LABA USAHA</b>   | <b>616.288</b>    | <b>513.384</b>    |
| <b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN, bersih:</b>                                     |                   |                   |
| Rugi pelepasan/penjualan aktiva tetap   | (817)             | (549)             |
| Pendapatan bunga  | 6.840             | 14.165            |
| Laba selisih kurs, bersih   | 697               | 1.717             |
| Rugi selisih kurs valuta berjangka, bersih  | (28.846)          | (53.363)          |
| Lainnya   | -                 | (2.863)           |
| <b>JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, bersih:</b>  | <b>(22.126)</b>   | <b>(40.893)</b>   |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>   | <b>594.162</b>    | <b>472.491</b>    |
| <b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>  |                   |                   |
| Pajak kini  | (154.374)         | (130.533)         |
| Pajak tangguhan   | 3.262             | (1.381)           |
|   | (151.112)         | (131.914)         |
| <b>LABA SEBELUM HAK MINORITAS</b>   | <b>443.050</b>    | <b>340.577</b>    |
| <b>HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN</b>                             | (134)             | (119)             |
| <b>LABA BERSIH</b>  | <b>442.916</b>    | <b>340.458</b>    |
| <b>Laba per saham (dalam Rupiah):</b>   |                   |                   |
| Laba usaha  | 29.250            | 24.366            |
| Laba bersih   | 21.021            | 16.158            |
| <b>Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar/ ditempatkan (dalam angka penuh)</b> | <b>21.070.000</b> | <b>21.070.000</b> |

Catatan : Laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Jakarta, 30 Maret 2011  
Direksi Perseroan

